

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdullah, R., 2011, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajawali Press, Jakarta
- Aryanto, I.K., 2014, *Menatap Masa Depan Aparatur Sipil Negara (Review Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara)*, Mahasiswa Kelas BAPPENAS VIII MAP UGM, Yogyakarta.
- Aziz, N.M., 2011, *Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta Timur
- Colin, M. A. dan Amal, I., 1993, *Hubungan Pusat - Daerah dalam Pembangunan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987, *Kewajiban dan Hak Pegawai Negeri Sipil*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Djarmiko, S., dan Marsono, 1975, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Dwiyanto, A., Latief, M.S., Hadna, A.H., dan Arfani, R.N., 2003, *Teladan dan Pantangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan otonomi daerah*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta.
- Effendi, S., 2010, *Reformasi Tata Pemerintahan (Menyiapkan Aparatur Negara Untuk Mendukung Demokratisasi Politik dan Ekonomi Terbuka)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Fajar, M.N.D dan Achmad Y, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gaffar, A., 2006, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Gie, T.L., 1968, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia* (Jilid III), Gunung Agung, Jakarta
- Gufron, A., dan Sudarsono, 1991, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hadi, S., 2000, *Metodelogi Research Jilid 1*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Hadjon, P.M., Soemantri, S.R., Soewignyo, M., Basah, S., Manan, B., Marzuki, H.M.L., Tenberje, J.B.J.M, Boeren PJJ.V., dan Stoink, F., 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamzah, A., 1990, *KUHPidana dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hartini, S., Kadarsih, S. dan Sudrajat, T., 2014, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik dan Magister Administrasi Publik Universitas Gajah Mada, 2010, *Antara Birokrasi dan Politik di Daerah*, Gama Media, Yogyakarta.
- Kaho, J.R., 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (identifikasi beberapa faktor yang yang mempengaruhi penyelenggaraannya)*, RajaGraffindo Persada, Jakarta.
- M.D. Mahfudz, M., 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Manan, B., 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta.
- , 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- , 1993, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, UNISKA, Karawang.
- Mariun, 1975, *Azas-azas Ilmu Pemerintahan*, Fakultas Sosial dan Politik UGM, Yogyakarta

- Marzuki, P.M., 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muchsan, 1982, *Hukum Kepegawaian*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muslimin, A., 1960, *Ichtisar Perkembangan Otonomi Daerah 1903-1958*, Jambatan, Jakarta
- Nyakman, M., 1995, *Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Tim Suara Perbaruan, Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Pide, A.M., 1999, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S., 2013, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta
- Prakoso, D., 1996, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prijodarminto, S., 1993, *Sengketa Kepegawaian Sebagai Bagian Dari Sengketa Tata Usaha Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Purbopranoto, K., 1981, *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*, Binacipta, Bandung.
- Rohyati, A., 2006, *Pilkada dan Pengembangan Demokrasi Lokal*, KPU Provinsi DIY, Yogyakarta.
- Salam, D.A., 2004, *Manajemen Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi)*, Djambatan, Jakarta
- Santoso, T., 2007, *Hukum dan Demokrasi: Problematikan Seputar Pemilu dan Pilkada*, Kemitraan, Jakarta.
- Soehino, 1983, *Perkembangan Pemerintah Daerah*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, S., dan Mamuji, S., 1985, *Penelitian Hukum dan Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

- Sosiawan, U.M., 2006, *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Kaitannya Dengan Otonomi Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Stefanus, K.Y., 1995, *Mengenal Peradilan Kepegawaian di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Subardjo, 2009, *Diktat Metode Penelitian Ilmu Hukum (MPIH)*, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.
- Subianto, A., 2004, *Setelah Pensiun*, RBI Research, Jakarta.
- Suhendang, E., 2013, *Pengantar Ilmu Kehutanan Edisi Dua*, IPB Press, Bogor.
- Sukismo, B., 1984, *Beberapa Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil*, Satria, Yogyakarta
- Sumardjono, M.S.W., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, UGM, Yogyakarta.
- Sunindhia, Y.W., 1996, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Surianingrat, B., 1981, *Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia Suatu Analisa*, Dewaruci Press, Jakarta.
- Syafiie, I.K., 2013, *Ilmu Pemerintahan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Widiyanti N dan Sunindhia YW., 1987, *Kepala Daerah dan Pengawasan dari Pusat*, Bina Aksara, Jakarta.
- Wigysubroto, S., 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta.
- Winardi, 2008, *Dinamika Politik Hukum Pasca Perubahan Konstitusi dan Implementasi Otonomi Daerah*, Setara Press, Malang.
- Yudoyono, S. B., Amal, I. dan Effendi, S., 2002, *Good Governance dan otonomi daerah (menyongsong AFTA tahun 2003)*, Forkoma – MAP UGM, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 45 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5210.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593.

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jambi, Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 28.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Pengawasan Pemilihan Umum.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Internet

Meliala, A.C., “Berlaku Nasional, Status PNS daerah hilang”, *<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/12/04/352464/berlaku-nasional-status-pns-daerah-hilang>*, terakhir diakses tanggal 20 April 2016.

Nurdin, D., “Bawaslu Temukan Indikasi Pengerahan PNS dalam Pilkada”, *<http://jambi.tribunnews.com/2015/08/08/Bawaslu-temukan-indikasi-pengerahan-pns-dalam-pilkada>*, diakses pada tanggal, 20 Desember 2015.